

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN DESA LOLOWONU NIKO'OTANO KECAMATAN GUNUNGSITOLI

Oleh:
Epianu Halawa ¹⁾
dan Fransiskus Pascal Bali ²⁾
Universitas Darma Agung, Medan^{1,2)}
E-mail:
epyhalawa21@gmail.com

ABSTRACT

The success of a program without community participation will not run well if there is no community participation, which is very much needed in planning or programs, so that the program runs properly. Participation is the involvement of the community in encouraging the acceleration of development. The role of the people of Lolowonu Niko'otano Village, Gunungsitoli District in current development is not only as an object, but also as the subject of the development. The problem in this research is how the community's participation in the planning, implementation, and maintenance of village development in Desa Lolowonu Niko'otano, Gunungsitoli District. The purpose of this study was to find out how community participation in the planning, implementation, and maintenance of village development in the village of Lolowonu Niko'otano, Gunungsitoli District. The results of this study indicate that the role of the village government by involving village communities in deliberations increases community participation in the village development process in the village of Lolowonu Niko'otano, Gunungsitoli District, there are several stages of development, namely: (1) Planning (2) Decision Making (3) Implementation (4) Evaluation, and (5) Utilization of Development Results.

Keywords: *Role of Village Government, Participation, Development*

ABSTRAK

Keberhasilan suatu program tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan berjalan dengan baik tanpa keikutsertaan masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam perencanaan atau program, agar program berjalan dengan semestinya. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam mendorong percepatan pembangunan. Peran masyarakat Desa Lolowonu Niko'otano Kecamatan Gunungsitoli dalam pembangunan sekarang ini bukan hanya sebagai objek saja, tetapi juga sebagai subjek dari pembangunan tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan pembangunan desa di Desa Lolowonu Niko'otano Kecamatan Gunungsitoli. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan pembangunan desa di Desa Lolowonu Niko'otano Kecamatan Gunungsitoli. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Desa dengan mengikutsertakan masyarakat desa dalam bermusyawarah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa di Desa Lolowonu Niko'otano Kecamatan Gunungsitoli, terdapat beberapa tahapan pembangunan, yaitu: (1) Perencanaan (2) Pengambilan Keputusan (3) Pelaksanaan (4) Evaluasi, serta (5) Pemanfaatan Hasil Pembangunan.

Kata Kunci : *Peran Pemerintah Desa, Partisipasi, Pembangunan*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proses multidimensi yang terdiri dari struktur sosial, lembaga dan pertumbuhan ekonomi, upaya mengurangi kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan. Pembangunan yang merupakan upaya yang terus berkelanjutan diharapkan dapat memberikan perubahan bagi manusia menjadi lebih baik. Pemerintah saat ini telah

memberikan kewenangan yang cukup baik untuk desa dalam mengelola pembangunannya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal yang ada di desa tersebut.

Dengan demikian pemerintah juga memberikan pendelegasian terhadap kepala desa untuk melaksanakan urusan pemerintah dengan baik dengan melibatkan masyarakat

agar berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan dan bekerjasama dengan pemerintah karena masyarakat merupakan subjek dalam pembangunan.

Oleh karena itu masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan harus lebih ditingkatkan karena sasaran pembangunan adalah masyarakat desa itu sendiri. Masyarakat tidak hanya objek tetapi subjek yang menentukan juga arah pembangunan yang bagaimana yang ingin dinikmatinya. Mengingat pentingnya upaya pemerintah Desa mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Desa, maka hal ini tentu saja membuat Pemerintah Desa Lolowonu Niko'Otano juga tidak ketinggalan untuk mengujudkannya.

Dimana diharapkan pemerintah lebih berperan untuk memotivasi masyarakat, agar masyarakat mau ikut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan di desa Lolowonu Niko'Otano Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. Namun dari prasurey terdapat beberapa indikasi yang menyebabkan kurangnya upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat antara lain, kurang berkualitasnya Kepala Desa dan kurang paham akan perannya sebagai pemimpin, juga banyak masyarakat yang belum tahu dan yang tak mau tahu betapa penting pemberdayaan didalam usaha atau upaya pemerintah mendorong masyarakat berpartisipasi di Desa, masyarakat cenderung tidak mau ikut serta didalam urusan pemerintah dikarenakan kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah kondisi demikian membuat sikap apatis yang menguat sehingga bila mereka tidak tahu tentang upaya pemerintah Desa mendorong masyarakat berpartisipasi maka mereka akan tidak terlibat dalam pembangunan yang ada di desa.

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini :

- (1) Bagaimana Peran Pemerintah Desa Meningkatkan Peranserta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Lolowonu Niko'Otano Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli?
- (2) Kendala apa saja yang dihadapi dalam Peran Pemerintah Desa Meningkatkan Peranserta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Lolowonu

Niko'Otano Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Peran

Peranan berasal dari kata peran dan mendapat akhiran an, sehingga menjadi kata peranan. Peran mempunyai hubungan dengan aspek dinamis kedudukan, apakah seseorang ataupun kelembagaan. Soekanto (2005:268) mengemukakan “ Apabila seseorang atau lembaga melakukan apa yang disebut hak, kewajiban sesuai kedudukanseseorang maka ia sedang melaksanakan perannya. Peranan memiliki arti tindakan seseorang yang dianggap penting sebagai struktur sosial masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto (1990: 243) peranan meliputi suatu norma yang ada kaitannya dengan posisi individu dalam masyarakat yang terkait dalam ikatan peraturan yang menjadi pedoman seseorang bertindak dalam kehidupan sosial. peran merupakan wujud dari penyesuaian diri terhadap kedudukan atau posisi yang dimiliki dalam suatu sistem sosial tertentu. Sehingga proses pelaksanaan peran tersebut menjadikan pelaku tersebut menjalankan suatu fungsi tertentu.

Peranan mencakup tiga hal, yaitu

1. Mencakup norma-norma yang terhubung dengan posisi seseorang di masyarakat
2. Merupakan konsep terkait apa yang harus dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat
3. Juga sebagai tindakan dari sikap individu yang terkait fungsinya yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Pemerintah Desa dalam tugasnya menyelenggarakan pemerintahan di desa tidak terlepas dari pembangunan, pembinaan dan kegiatanmemberdayakan masyarakat desa. Demikian pula Desa mempunyai arti penting dalam mengamankan dan menegakkan pilar-pilar kebangsaan yang utama yaitu pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI.

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Menurut Mardikanto, dalam Besti (2018:607) menjelaskan bahwa pembangunan merupakan usaha secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus menerus oleh pemerintah bersama dengan masyarakatnya dengan dipimpin pemerintah baik pusat atau daerah dengan menggunakan teknologi terpilih dalam memenuhi kebutuhannya sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat.

Pokok pikiran yang ada dalam pembangunan adalah :

- 1)Pembangunan sebagai proses yang terus berlanjut untuk mewujudkan perubahan lebih baik dalam situasi lingkungan maupun kehidupan masyarakat sehingga tercapai perbaikan mutu masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya.
- (2)Proses pembangunan itu bukan bersifat alami melainkan proses yang dilaksanakan dengan sadar dan terencana.Ada perencanaan, analisis masalah dan kebutuhan, tujuan yang dicapai dan alternatif tujuan sesuai Analisis SWOT.
- (3)Proses perubahan yang ingin dicapai adalah perubahan yang menyeluruh, mencakup segala aspek kehidupan masyarakat untuk menghasilkan kondisi masyarakat yang peka terhadap masalah yang terjadi sehingga mampu mencari alternatif baik bersifat swakarsa, swadaya dan swadana.
- (4)Pembangunan dilakukan dari, untuk dan oleh masyarakat itu sendiri dan bukan hanya satu golongan atau kelompok tertentu saja karena itu pembangunan bertujuan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam memutuskan, dan terlibat dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan pengawasan serta pemanfaatan hasilnya oleh masyarakat.
- (5)Pembangunan adalah membangun manusia itu sendiri dan pembangunan masyarakat yang bersangkutan. Pembangunan diharapkan mampu meningkatkan mutu hidup setiap masyarakat dan tidak menelantarkan manusia atau masyarakatnya.

Untuk itulah diperlukan adanya perubahan sikap mental yang baik yang dapat mendukung pembangunan baik dalam diri masyarakat maupun pemerintah yang ada di desa. Untuk itu harus ada rumusan ataupun strategi yang diciptakan guna melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat desa.

Pembangunan Infrastruktur Desa

Infrastruktur adalah wadah dari pembangunan. Kondisi infrastruktur yang baik dapat menjadi akses bagi masyarakat memperoleh sumber daya sehingga dapat meningkatkan produktivitas dari perkembangan ekonomi suatu kawasan atau wilayah. Oleh karena itu penting mempersiapkan sistem rekayasa dan manajemen bagaimana infrastruktur dapat diarahkan dapat mendukung perkembangan ekonomi suatu wilayah atau pedesaan. Nantinya sistem rekayasa dan manajemen dari penyediaan infrastruktur berpengaruh terhadap proses penggunaan lahan yang digunakan dalam pembangunan. Proses tersebut memanfaatkan sumberdaya dalam rangka pemanfaatan untuk transportasi, infrastruktur sistem tata guna lahan seperti Sistem Ekonomi, Sosial-budaya, kesehatan, dan kesejahteraan.

3. METODE PENELITIAN

Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tergolong pada tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2011:6) penelitian kualitatif bertujuan memahami suatu fenomena yang dialami subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara keseluruhan dan digambarkan dalam bentuk pernyataan yang tertulis dalam bahasa sesuai konteks khusus dari latar alamiah dengan memanfaatkan beberapa cara ilmiah. Jenis penelitian ini berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena yang terjadi dilapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai Peran Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan di desa Lolowonu Niko'Otano Kecamatan Gunungsitoli.

Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih untuk penelitian adalah Desa Lolowunu Niko'Otano Kecamatan Gunungsitoli. Informan Penelitian sebagai sumber data kualitatif yang utama disamping data-data lain, seperti studi pustaka, dengan teknik purposive (bertujuan), dengan pertimbangan bahwa peneliti mengambil sumber beberapa orang yang dianggap mempunyai informasi yang tepat dan relevan mengenai masalah penelitian yaitu Peran Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan di Lolowunu Niko'Otano Kecamatan Gunungsitoli.

Adapun informan dalam pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti sebanyak 11 orang yang terdiri dari dua kategori yaitu : Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Keuangan, Seksi Kemasyarakatan, Kepala Dusun II, Tokoh Agama, dan 4 Orang Tokoh Masyarakat.

Pengumpulan data dengan cara sebagai berikut: Wawancara Dokumentasi Observasi dan analisis data dengan mengumpulkan data yang didapat dan mengorganisasikan data tersebut sesuai penggolongannya lalu disimpulkan dengan mencari sesuai pola dan data penting dari penelitian. Dalam penelitian kualitatif, tahapan analisis data meliputi antara lain: Reduksi data (Reduction Data), menyajikan data dan membuat Penarikan kesimpulan (Concluting Drawing).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN **Peran Pemerintah Desa Dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan**

Peneliti mencoba mengorelasikan antara data lapangan dengan teori pembuatan keputusan bahwa, model keputusan tingkat desa di Desa Lolowunu Niko'otano tergolong model elitis, dimana kekuasaan hanya terkonsentrasi di golongan atau kelompok elit (segelintir orang)

Hal ini dilihat dari: Sistem pemerintahan desa Lolowunu Niko'otano masih menggunakan sistem lama, dimana berjalannya musyawarah Desa, masih menunggu perintah dari Kepala Desa. Musyawarah Desa menjelaskan bahwa yang hadir dalam pelaksanaan Musyawarah adalah, tokoh masyarakat baik dari golongan marga, adat, agama, pendidik, perwakilan

kelompok nelayan, pengrajin dan tani, bahkan kelompok swadaya lainnya.

]Model pengambilan keputusan yang telah terlaksana di Desa Lolowunu Niko'otano belum mencapai tujuan. Dapat dikatakan bahwa implikasi dari keputusan yang telah diambil oleh pemerintah Desa Lolowunu Niko'otano belum sesuai sepenuhnya dengan kebutuhan masyarakat Desa Lolowunu Niko'otano. Pertama, tujuan dari musyawarah adalah menyepakati hal-hal yang bersifat strategis. Hal-hal yang bersifat strategis meliputi, perencanaan tentang desa dan penataannya. Siapa dan instansi apa yang akan dijadikan mitra dan bagaimana rencana investasi ke desa.

Selain itu pembentukan BUMDes, dan kondisi penambahan atau pelepasan aset desa, dan kejadian luar biasa. Kedua,, tujuan dari musyawarah adalah mengembangkan Demokrasi Desa, dimana masyarakat berhak memperoleh informasi terkait rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Masyarakat juga berhak memantau pelaksanaan pembangunan desa dan melaporkan hasilnya dalam rapat di pemerintahan desa dan BPD.

Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Kegiatan

Menurut sekretaris desa yang diwawancarai, di Desa Lolowunu Niko'otano ini tidak tentu melakukan musyawarah. "tapi kalok musyawarah yang kamu sebutkan tadi, yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, tokoh masyarakat, dan yang lain sebagainya. sebenarnya orang-orang itu sudah bosan kalok rapat-rapat terus itu. Tapi begini, kalok saya butuh mengabarkan program kecamatan seperti beras miskin, itu saya langsung menghubungi bawahan- bawahan saya untuk membagikannya pada masyarakat yang benar-benar kurang mampu.

Sebenarnya rapat itu sesuai dengan kebutuhan, kalok satu bulan membutuhkan 2 kali rapat, ya, saya melakukan 2 kali dalam satu bulan. Saya langsung memanggil semua perangkat Desa, suruh ke kantor dan kita sering- sering sama. Karena dengan begini, Kepala Desa itu menyentuh langsung ke masyarakat. Karena setiap permasalahan di desa, entah itu pertengkaran, atau kecelakaan tengah malam,

itu bukan polisi yang dipanggil oleh warga, ya Kepala Desa.” (Hasil wawancara dengan Bapak Sitevanus Telaumbanua, pada tanggal 09 Juni 2020, pada jam 10.30 wib, Via Whatshapp).

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa diatas memberikan gambaran bahwa pelaksanaan musyawarah di Desa Lolowonu Niko’otano bisa dikatakan kurang maksimal. Dan yang hadir dalam musyawarah tersebut hanya orang-orang tertentu seperti; Kepala Desa, sekretaris desa, ketua BPD dan beberapa anggota pemerintahan desa dan beberapa tokoh masyarakat setempat dan sifat dalam musyawarah juga kurang transparan. Serta setiap kali ada program menunggu perintah dari Kepala Desa, tidak ada musyawarah yang membicarakan hal yang strategis untuk perkembangan baik secara struktural maupun secara infrastruktur di Desa Lolowonu Niko’otano.

Dari data yang telah dipaparkan di atas dapat digambarkan bahwa hal yang demikian yang menjadi akar persoalan desa Lolowonu Niko’otano. Salah satu persoalannya adalah; terhambatnya pembangunan secara merata, hingga mengakibatkan kecemburuan sosial. Terhambatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya musyawarah dan keterlibatan masyarakat dalam merumuskan hal-hal yang bersifat strategis untuk desa tanpa harus menunggu komando dari Kepala Desa. Kurang keterbukaan atau transparansi antara pemerintah pada masyarakat, yang berkaitan dengan desa. Sulitnya merealisasikan sistem keadilan untuk masyarakat desa.

Peran Pemerintah Desa Dalam Tujuan dan Hasil Keputusan

Menurut Soetari (2014:7) Kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa yang dicakup dalam kata kekuasaan politik. “Menurut saya dalam hal tujuan menanggulangi persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial masih perlu banyak perhatian, memang benar ada pembangunan jalan, pembangunan jembatan, tapi tidak lama rusak, belum satu tahun sudah rusak lagi. Ada cukup kuat jalan beraspal di desa ini, hanya jalan ke rumah Kepala Desa, dan perangkat desa lainnya”. (Hasil wawancara dengan Bapak Tony Telaumbanua, pada tanggal 11 Juni 2020, pada jam 10.30

wib, Via Whatshapp). Dari pernyataan tersebut menggambarkan tujuan dari mengurangi persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial masih kurang terealisasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan diatas, dapat diketahui bahwa salah satu tujuan musyawarah adalah terealisasinya kebutuhan masyarakat dan pembangunan yang merata. Dari pernyataan tokoh agama diatas terlihat bahwa, pembangunan yang ada selama ini tidak merata dan kurang serius, hal ini dilihat dari jalan Desa yang sudah diperbarui tidak bertahan lama dan cepat rusak, berbeda dengan jalan desa yang menuju rumah Kepala Desa, lebih tahan lama dan bagus, tidak ada aspal-aspal yang rusak atau bolong-bolong.

Pembahasan SDM dan Lingkungan

Terkait dengan kemampuan sumber daya manusia, Tokoh Masyarakat menyatakan: “Memang pendidikan pelaksana Pemerintahan Desa sangat mempengaruhi kualitas manusianya. Ketika mereka diajak untuk tepat waktu, tepat mutu dan tepat administrasi, mereka lambat untuk mengikutinya. Maklum, mayoritas lulusan SMP, bahkan ada juga yang lulusan SD. Karena kekurangan SDM dan dia tahu betul masalah lapangan, makanya dipilih menjadi anggota pengurus di Desa Lolowonu Niko’otano ini.” (Hasil wawancara dengan Ibu Shanty, pada tanggal 06 Juni 2020, pada jam 15.00 wib, Via Whatshapp).

Beberapa faktor pendorong tersebut adalah: Adanya kemampuan pelaksana musyawarah dalam melakukan identifikasi dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan musyawarah, Kelengkapan sarana/prasarana Desa dalam mendukung pelaksanaan musyawarah. Sedangkan faktor penghambat yaitu terkait musyawarah, sehingga pemahaman pelaksanaan mengenai musyawarah yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Desa kurang maksimal.

Selain itu, masyarakat yang masih buta akan hukum, memberikan peluang bagi Pemerintahan Desa untuk tidak melakukan tugasnya dengan baik. Sumber daya manusia sangatlah penting dalam melaksanakan musyawarah, jika sumber daya manusianya sudah tidak mempunyai simpati akan desa,

maka pemilik kekuasaan akan cenderung menjalankan pemerintahannya pada kepentingan personal atau golongan.

Tanpa dukungan sumberdaya (manusia) yang cukup, baik secara kuantitas maupun kualitasnya, maka sebuah implementasi kebijakan tidak akan berhasil terlaksana dan tercapai tujuannya.

Dari data yang diperoleh oleh peneliti, dapat digambarkan bahwa kualitas SDM di desa Lolowonu Niko'otano dapat dikatakan lemah, karena mayoritas masyarakat di Desa Lolowonu Niko'otano berpendidikan hanya sampai SMP (Sekolah Menengah Pertama), untuk pemudanya kebanyakan memilih menjadi pelayar di kapal.

Hal ini memberikan pengaruh kepada perkembangan di Desa Lolowonu Niko'otano, baik secara materil dan non materil.

Peningkatan Partisipasi Dalam Perencanaan Pembangunan

Proses partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan di Desa Lolowonu Niko'otano dimulai dari tahap yang paling bawah yaitu musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat kampung kemudian musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat desa.

Musrembangdes merupakan musyawarah yang dilakukan ditingkat kampung yang dihadiri oleh seluruh unsur masyarakat wilayah kampung. Dalam musyawarah tersebut masyarakat akan membahas berbagai bidang dan sektor dimasing-masing kampung untuk menemukan program kegiatan yang akan dirumuskan. Hasil program yang dirumuskan dalam Musrenbangdes tersebut yang akan dibahas pada Musrenbangdes untuk diprioritaskan program mana saja yang paling dibutuhkan masyarakat sesuai anggaran yang ada dan kebutuhan masyarakat Desa.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan merupakan hubungan antara perencanaan dan pelaksanaannya cukup erat. Masalah pelaksanaannya sudah cukup dipertimbangkan dalam menyusun rencana hal ini agar terdapat jaminan yang lebih besar dalam

merealisasikan tujuan dan sasaran-sasaran dan rencana itu. Oleh sebab itu, rencana harus diupayakan semaksimal mungkin.

Pembangunan meliputi pengaruh daya dan dana administrasi, koordinasi dan penjabarannya dalam program pembangunan. Tahap pelaksanaan dilakukan setelah perencanaan ditetapkan dan partisipasi masyarakat dapat dilihat dari proses pelaksanaan program pemanfaatan dana desa di Desa Lolowonu Niko'otano.

Selain itu proses partisipasi dapat dilihat dari keaktifan masyarakat dalam ikutsertaan melaksanakan pekerjaan dalam kegiatan pembangunan yang berupa pembuatan Jembatan, gorong-gorong, serta infrastruktur yang berupa jalan dan bangunan, dalam kegiatan pembuatan pembangunan untuk menunjang setiap program pembangunan di Desa Lolowonu Niko'otano yaitu dengan memberikan kontribusi harta yang berupa makanan dan minuman yaitu seperti gorengan, air kopi dan air putih.

Kemudian kontribusi tenaga dan keahlian yaitu masyarakat ikut berpartisipasi didalam pekerjaan pembuatan talut dan gorong-gorong dengan menggali tanah dengan bergotong royong bersama masyarakat yang lainnya.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemeliharaan dan Pemanfaatan

Partisipasi pemeliharaan dan pemanfaatan meliputi menerima hasil dari pembangunan menjadi milik bersama dan menggunakannya untuk menjadikan atau mengusahakan suatu lapangan usaha, merawat secara rutin dan sistematis, mengatur kegunaan atau memanfaatkannya dengan menjaga dan mengamankannya dan mengembangkan.

Partisipasi pemeliharaan dan pemanfaatan pembangunan agar dapat diwariskan untuk generasi yang akan datang. Sedangkan partisipasi dalam pemeliharaan dan pemanfaatan diberikan langsung kepada masing-masing masyarakat yang merasakan manfaat dari hasil terlaksananya pembangunan desa tersebut.

Dalam hal ini partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pemanfaatan sangat penting karena masyarakat adalah tujuan utama dari

setiap pembangunan maka masyarakat juga harus memelihara dan mengusahakannya sebaik mungkin. Partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pemanfaatan berjalan sesuai yang diharapkan, dalam hal ini tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga hasil pembangunan sudah nampak adanya walaupun pada tahap ini partisipasi dalam proses pemeliharaan, masyarakat hanya diharuskan dan tidak ada peraturan tertulis dan terikat dari Desa Lolowonu Niko'otano sendiri yaitu dengan menjaga dan merawatnya dengan baik .

Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Desa Lolowonu Niko'otano Kecamatan Gunungsitoli

Faktor Penghambat Dalam Pembangunan yaitu: Pada segi positif partisipasi adalah peran serta masyarakat secara emosional dalam melaksanakan program pembangunan yang adirencanakan bersama. Keterbatasan pada dana yang masih belum mencukupi yang akan diperuntukan bagi kemajuan masyarakat desa khususnya dalam memberikan pelayanan kemajuan masyarakat desa tersebut. Faktor Pendukung Dalam Pembangunan yaitu: Pemerintah desa bersikap transparan kepada masyarakat mengenai jumlah anggaran desa yang diterima dari kabupaten dan juga adanya dukungan SDM yang mampu mempersiapkan SPJ dengan tepat waktu.

Keterlibatan masyarakat secara aktif merupakan peran penting agar program pembangunan berjalan sesuai yang diharapkan. Partisipasi masyarakat dalam mengelola dana desa adalah hak bagi warga untuk menyalurkan, mengakses, mengontrol program di desa.

5. KESIMPULAN

Setelah peneliti melakukan penelitian lapangan (Field Research), dan setelah penulis menganalisa yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Peran dari Pemerintah Desa Lolowonu Niko'otano belum benar benar mengikut sertakan masyarakat Desa baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan bahkan mengambil

keputusan agar memenuhi tujuan dan keinginan masyarakat. Sistem pemerintahan desa Lolowonu Niko'otano masih menggunakan sistem lama, dimana berjalannya musyawarah Desa, masih menunggu perintah dari Kepala Desa perlu dipertimbangkan kembali. Musyawarah Desa menjelaskan bahwa yang hadir dalam pelaksanaan Musyawarah adalah, sekelompok elit saja. Masyarakat Desa Lolowonu Niko'otano tidak dilibatkan dalam pelaksanaan musyawarah yang membicarakan hal-hal bersifat strategis untuk Desa.

2. Tingkat partisipasi masyarakat Desa Lolowonu Niko'otano dapat dilihat pada tahap perencanaan. Hasil program yang dirumuskan dalam Musrenbangdes untuk memprioritaskan program mana saja yang paling dibutuhkan masyarakat yang sesuai anggaran yang ada dan kebutuhan masyarakat desa belum strategis.
3. Pelaksanaan pembangunan desa sudah memiliki kesukarelaan dalam berpartisipasi dengan memberikan kontribusi yang berupa pikiran, tenaga, uang dan keahlian untuk menunjang setiap program pembangunan di Lolowonu Niko'otano. Serta Pengawasan masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan hasil dari pembangunan itu sendiri sebab masyarakat ikut terlibat dalam memberikan kontribusinya maka akan meningkatkan rasa memiliki dan bertanggung jawab moral terhadap keberhasilan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.
4. Faktor Pendukung pembangunan Desa Lolowonu Niko'otano dilihat dari adanya dukungan dari Pemerintah Desa yang berkooperatif dan komunikasi efektif dalam meregulasi Anggaran di wilayah Desa Lolowonu Niko'otano dan merupakan peran penting sehingga program pembangunan dapat berjalan
5. Faktor Penghambat pembangunan Desa Lolowonu Niko'otano dilihat dari adanya Keterbatasan pada dana yang masih minimalis yang akan diperuntukan bagi kemajuan masyarakat desa khususnya dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Minimnya ketersediaan dana Anggaran Desa Lolowonu Niko'otano sehingga tidak dapat menyelesaikan kebutuhan masyarakat desa.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Atmosudirjo, Prajudi. 1982. *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Azra, Azyumardi. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Tim ICCE UIN.
- Besti Rohana Simbolon, 2018, *Strategi Komunikasi Pemerintahan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Desa Wisata Tuktuk Siadong Kabupaten Samosir*. Volume XXVI. DARMA AGUNG
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika
- Mardikanto dan Soebianto. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA.
- Moeleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Narwoko, J. Dwi dan Suyanto, Bagong (editor). 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* edisi ketiga. Jakarta : Prenada Media Group
- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardjo. 2008. *Politik Lokal Parlemen Desa*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemodiningrat, Gunawan. (2009). *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: IDEA dan Pustaka Pelajar.
- Sondang, P. Siagian. 2002. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sumaryadi, I. Nyoman. 2010. *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Wirawan, Ricky. 2015. *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan*

Daerah. Vol. 4, No. 2 (2015)
Universitas Brawijaya

Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Skripsi

Ahmadi, Abu. (2003). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Universitas Brawijaya Malang.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang No.6 Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang No.6 Pasal 26 Ayat 1 dan 2